

**TINJAUAN KRITIS KONSEP MASYARAKAT TERBUKA TERHADAP
PERSOALAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA**

Losianus Harjon¹, Stefanus Suriadi Jadur², Johaness Jong Sogen³, Perseverando Giano
Hppy Putra⁴, Oktavians Edward Metta⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

Email: harjonlosianus@mail.com¹, stefanussuriadi@gmail.com²,
johnsogen602@gmail.com³, gianohappyputra25@gmail.com⁴, vianmetta@gmail.com⁵

Abstrak: Perkembangan politik identitas dalam demokrasi Indonesia dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang problematis karena sering dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan yang bersifat eksklusif, diskriminatif, dan berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. Politik identitas, khususnya yang berbasis agama mayoritas, kerap digunakan oleh elit politik untuk memobilisasi massa melalui narasi historis dan janji-janji utopis, sehingga mengaburkan nilai keterbukaan, kebebasan, dan kesetaraan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengkritisi fenomena politik identitas di Indonesia melalui perspektif filsafat politik Karl Popper, khususnya konsep masyarakat terbuka, anti-historisisme, dan anti-utopianisme. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, yang mengandalkan analisis kritis terhadap karya-karya Karl Popper serta literatur ilmiah yang relevan dengan konteks politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas di Indonesia mencerminkan gejala masyarakat tertutup karena menolak pluralitas, membatasi partisipasi politik, dan mengedepankan klaim kebenaran historis serta utopia politik tertentu. Dalam terang pemikiran Popper, praktik politik identitas tersebut bertentangan dengan prinsip masyarakat terbuka yang menuntut keterbukaan, kritik rasional, dan demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan reflektif untuk menekan praktik politik identitas yang eksklusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadaban di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Identitas, Demokrasi, Masyarakat Terbuka, Karl Popper, Indonesia.

Abstract: *The development of identity politics in contemporary Indonesian democracy reveals a problematic tendency, as it is frequently exploited as an instrument of power that is exclusive, discriminatory, and potentially undermines democratic principles. Identity politics, particularly those based on the majority religion, are often utilized by political elites to mobilize the masses through historical narratives and utopian promises, thereby obscuring the values of openness, freedom, and equality among citizens. This study aims to examine and critically assess the phenomenon of identity politics in Indonesia from the perspective of Karl Popper's political philosophy, particularly the*

concepts of the open society, anti-historicism, and anti-utopianism. The research employs a descriptive qualitative approach through a literature review, relying on critical analysis of Karl Popper's works and relevant scholarly literature within the Indonesian political context. The findings indicate that identity politics in Indonesia reflects characteristics of a closed society, as it rejects pluralism, restricts political participation, and promotes claims of historical determinism and specific political utopias. In light of Popper's thought, such practices are fundamentally incompatible with the principles of an open society, which emphasize openness, rational criticism, and inclusive democracy. Therefore, educational and reflective efforts are necessary to curb exclusive forms of identity politics in order to foster a healthy and civilized democracy in Indonesia.

Keywords: Identity Politics, Democracy, Open Society, Karl Popper, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara seperti ini biasanya menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negaranya. Sistem demokrasi ini merupakan sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan penilik kedaulatan. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 Ayat (1) juga menegaskan hal ini, yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini menyatakan bahwa rakyat adalah pengabdikan sekaligus yang diabdikan oleh negara. Semua rakyat memperoleh hak dan keterlibatan penuh dalam penyelenggaraan negara, tapi ada otoritas lain yang mewakili mereka untuk menjalankan peran tersebut. Otoritas tersebut dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat tersebut dalam pengabdian kepada negaranya.

Sistem demokrasi yang dianut sebuah negara menghendaki adanya kebebasan berpendapat dan berpolitik. Kebebasan tersebut adalah hak yang mesti dipenuhi dan dijamin oleh sebuah negara. Akan tetapi, kebebasan berpolitik dan berpendapat itu mesti diarahkan untuk kebaikan negara. Dengan kata lain, rakyat menggunakan hak tersebut untuk menunjang penyelenggaraan negara, bukan untuk menyerang negaranya sendiri. Kritik yang diberikan mesti memiliki orientasi yang konstruktif dan mengarah pada kepentingan bersama, bukan untuk menghancurkan dan memecah-belahkan semua orang. Oleh karena itu, dibutuhkan situasi politik yang sehat,

yakni politik yang dapat menunjang negara dalam seluruh proses pembangunan negara dan kemanusiaanya. Akan tetapi, fakta memperlihatkan bahwa aktivitas politik para pemegang otoritas dalam negara sering didukung dengan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Politik kemudian dibelokkan arahnya pada jalur yang keliru sehingga penyelenggaraan negara pun menjadi tidak seimbang. Rakyat yang seharusnya menjadi objek pengabdian negara pun menjadi korban atas penyelewengan-penyelewengan otoritas public.

Konsep negara kesatuan yang berbentuk republik mengandaikan adanya persatuan dan persekutuan dalam negara tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sering kali tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya pluralitas masyarakat dalam berbagai aspek. Di Indonesia, misalnya, dengan perbedaan bahasa, agama, ras dan golongan, persatuan yang ideal pun sulit diwujudkan. Perbedaan tersebut justru sering melahirkan konflik dan benturan, baik itu perorangan maupun secara kelompok. Selain itu, ada beberapa kelompok atau golongan tertentu yang ingin membentuk dominasi yang masif dalam berbagai aspek. Dominasi yang ekstrim dari kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain sering menimbulkan intimidasi dan diskriminasi. **Error! Hyperlink reference not valid.** Jika hal tersebut terjadi maka cita-cita persatuan yang dicanangkan tentu akan sulit tercapai. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai konsep bernegara agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga negara yang menjaga keutuhan dan persatuan.

Salah satu persoalan yang paling pelik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, yakni berkembangnya politik identitas. Politik identitas tersebut merupakan cara berpolitik dengan mengayomi bahkan memprovokasi massa dengan dalil kesamaan agama, ras dan golongan tertentu. Politik identitas yang berkembang di Indonesia lebih cenderung pada ide mengenai dominasi agama mayoritas, yakni agama Islam. Ini bukan lagi hal baru dan tabu di negara ini, melainkan sebuah kenyataan faktual yang semakin hari semakin tampak. Para politisi sering memanfaatkan nama besar Islam di negara ini untuk membocengi kepentingan-kepentingan mereka. **Error! Hyperlink reference not valid.** Mereka berusaha memprovokasi massa dengan cara-cara holistik demi

kepentingan mereka sendiri. Hal itu biasanya dilakukan, yakni dengan menggunakan ayat-ayat Kitab Suci agamanya untuk memantik emosi masyarakat pada persoalan-persoalan tertentu. Praktik seperti ini tentu sangat mengganggu stabilitas politik bangsa ini. Bagaimanapun juga politik mesti bebas dari dominasi atas kelompok-kelompok tertentu sehingga dengannya negara dapat berjalan menurut asas-asas kenegaraannya.

Menjawab persoalan politik identitas ini, penulis mencoba menggunakan pemikiran Karl Popper untuk meninjau dan mengkritisi persoalan tersebut dari sudut pandang filsafat. Konsep yang dipakai di sini adalah konsep filsafat politik Karl Popper yang umumnya dikenal sebagai konsep masyarakat terbuka.

KAJIAN TEORETIS

Konsep masyarakat terbuka Karl Popper terdapat dalam bukunya yang berjudul *“Masyarakat Terbuka dan Para Musuhnya”*. Konsep masyarakat terbuka (*the open society*) dikenal pula dengan istilah demokrasi. Menurut konsep ini, semua warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik serta mengusulkan pemecahan masalah bagi problem-problem yang dihadapi. Popper mempopulerkan kritik sebagai langkah untuk menghasilkan susunan masyarakat yang memadai, yakni sebuah masyarakat yang menjamin kebebasan secara optimal. Popper juga mengungkapkan bahwa pertanyaan pokok dalam filsafat politik bukanlah siapa yang harus memerintah. Akan tetapi, bagaimana setiap orang berusaha untuk mengurangi terjadinya pemerintahan yang kurang bertintegitas. Pertanyaan pertama, Plato telah mengklaim bahwa pemimpin yang baik haruslah seorang filsuf.

Klaim tersebut ternyata tidak menjamin kesejahteraan sebuah negara karena seorang filsuf pun belum tentu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan terampil. Karena itu, pertanyaan kedua yang menjadi pertanyaan Popper itu tentu bisa menjadi landasan untuk menggambarkan situasi yang mesti ada dalam sebuah negara. Keberlangsungan sebuah negara sangat ditentukan oleh kecermatan dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut oleh otoritas publik. Karena itu, para penyelenggara negara harus berusaha mengoreksi dan menyingkirkan ketidaksempurnaan yang alami dalam masyarakat.

Konsep masyarakat terbuka merupakan dalil untuk mengkritik kecenderungan masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup sendiri merupakan sebuah keadaan yang timbul akibat adanya sistem yang dibangun secara kaku dan dominan dalam struktur sosial masyarakat. Karena itu, Popper mengkritik pandangan Plato dan Marx yang memungkinkan terciptanya ketertutupan dalam masyarakat. Dalam buku *Republik*, Plato membagi masyarakat dalam tiga kelas sosial, yakni kelas penasihat dan pembimbing yang beranggotakan penasihat dan cendekiawan, kelas pembantu atau militer yang bertugas menjaga keamanan, dan kelas penghasil yang terdiri dari petani, pengusaha, niagawan tukang kayu dan tukang besi. Pembagian kelas tersebut dinilai Plato sebagai kenyataan absolut dalam sistem masyarakat manapun.

Popper menentang pembagian kelas tersebut dengan memandang hal tersebut sebagai prinsip totalitarianisme. Di sisi lain, Popper juga mengkritik pandang Marx yang membagi masyarakat dalam dua kelas, yakni kelas borjuis dan proletar yang akan selalu saling bertentangan. Kaum borjuis mengeksploitasi kaum proletar dan kaum proletar akan berjuang memperoleh hak-haknya. Menurut Popper, pembagian kelas dengan cara demikian berarti Marx menganggap bahwa pertentangan atau konflik merupakan sesuatu yang senantiasa melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kritik Popper terhadap dua sistem pembagian kelas dalam masyarakat ini menunjukkan keberpihakan Popper terhadap sistem masyarakat yang terbuka, yakni masyarakat yang menerima perbedaan sebagai kekayaan dan yang mengedepankan demokrasi sebagai pilar utama dalam kehidupan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Kajian utama penelitian ini bukan dari data penelitian lapangan, tetapi peneliti menganalisis konsep masyarakat terbuka dan didukung dengan sumber referensi dari buku filsafat politik, artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan fenomena politik di Indonesia. Fenomena ini dianalisis secara mendalam dalam terang pemikiran Karl Popper tentang masyarakat terbuka, anti historisisme, dan anti-utopianisme. Dengan demikian, penelitian

ini menganalisis secara mendalam tentang konsep masyarakat terbuka dan hubungannya dengan sistem politik identitas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas: sebuah masalahkah?

Politik identitas disebut juga sebagai politik perbedaan. Dalam hal ini, ada sebuah identitas khusus yang membedakan pihak yang satu dengan pihak yang lain, kemudian perbedaan tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk mengukuhkan keberadaan kelompok tersebut. Politik identitas ini biasanya tumbuh dalam masyarakat pluralis dan heterogen. Menurut Kemala, politik identitas terjadi pada tatanan praksis, yakni sebagai alat untuk manipulasi politik guna kepentingan politik dan ekonomi. Kemala sendiri lebih menekankan identitas kesukuan atau kesamaan etnis sebagai sarana untuk membentuk persekutuan baru. Di lain pihak, Agnes Heller berpendapat bahwa politik identitas sebagai konsep politik yang menekankan perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.

Dari dua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik identitas dengan sengaja dibuat untuk mengedepankan perbedaan sebagai aspek utama untuk membentuk kekuatan politik baru dalam usaha menghadapi oposisinya. Selain itu, politik identitas juga menyangkut dua aspek, yakni identitas sosial dan identitas agama. Namun, politik identitas yang eksis saat ini adalah kategori identitas agama. Hal ini karena agama telah berkembang pesat dan telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat global saat ini. Politik identitas merupakan sebuah cara berpolitik yang telah eksis dari zaman ke zaman. Istilah ini pertama kali digunakan untuk menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa anti-kekerasan SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*). Di Amerika Serikat, Politik Identitas merujuk pada kesadaran kelompok-kelompok yang diperas untuk melawan para pemeras. Kesadaran tersebut berasal dari masyarakat kulit hitam yang diintimidasi di negara tersebut.

Politik Identitas juga terlihat dalam gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup di Amerika Serikat untuk mendorong keadilan sosial dalam masyarakat setempat. Selain itu, negara-negara pecahan dari koloni besar Uni Soviet juga menggunakan politik

identitas untuk meruntuhkan dominasi Uni Soviet dan melepaskan diri dari genggaman negara tersebut. Dari beberapa gambaran tersebut, terlihat jelas bahwa arah politik identitas adalah meruntuhkan rezim yang mendiskriminasi kelompok tertentu. Kelompok itu memanfaatkan isu rasa senasib dan sepenanggungan untuk menentang dominasi tersebut. dengan demikian, politik identitas bukanlah hal yang buruk jika menyangkut usaha kemanusiaan tertentu. Akan tetapi, fakta tersebut tidak ditemukan dalam politik identitas yang ada di Indonesia.

Politik identitas yang terjadi di Indonesia terlihat dalam fakta pemanfaatan agama mayoritas (Islam) sebagai senjata untuk menaklukkan kelompok lain. Kebesaran nama Islam di tanah air Indonesia dipakai oleh beberapa oknum untuk menyuntik massa masuk dalam ranah politik yang dibangun orang tertentu. Isu-isu seperti pembentukan negara Khilafah, presiden harus seorang Muslim yang taat dan lain sebagainya, telah menjadi tolak ukur awal dari munculnya politik identitas di Indonesia. Selain itu, politik identitas di Indonesia juga umumnya lahir dari umat Islam garis keras, yakni aliran Islam yang menganggap agamanya sebagai sumber kebenaran mutlak dan menganggap agama lain sebagai kelompok orang-orang kafir. Kelompok ini biasanya merupakan kumpulan orang-orang yang anti-demokrasi, anti-pluralisme dan anti-Pancasila.

Ada beberapa organisasi yang menggunakan agama Islam untuk melanggengkan politik identitas di Indonesia, yakni MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Organisasi-organisasi tersebut telah terlibat aktif dalam aktivitas politik di Indonesia. Umumnya, organisasi-organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membangun persekutuan umat Islam di Indonesia. Akan tetapi, akhir-akhir ini tujuan itu semakin kabur karena mereka telah diboncengi oleh berbagai kepentingan politik dari orang-orang atau kelompok tertentu. Hal tersebut berdampak pada ketidakseimbangan perkembangan demokrasi di Indonesia. Politik seperti itu justru melahirkan konflik baru karena adanya usaha untuk mengejar kekuasaan dari masing-masing golongan, baik itu dari golongan nasionalis maupun dari golongan muslim. Jika demikian, demokrasi yang dianut bukan

melahirkan kebebasan berpolitik, melainkan akan menjerumuskan masyarakat pada praktik-praktik politik yang keliru.

Tinjauan Kritis Konsep Masyarakat Terbuka Karl Popper Terhadap Persoalan Politik Identitas di Indonesia

Konsep masyarakat terbuka Karl Popper dapat digunakan untuk mengkritisi persoalan politik identitas di Indonesia. Hal ini karena politik identitas merupakan sebuah bentuk ketertutupan masyarakat terhadap kebebasan politik yang mesti ada dalam sistem demokrasi. Dengan pembentukan koalisi-koalisi politik berdasarkan identitas tertentu, para pelaku politik dengan sendirinya membawa massa pada persekutuan identitas tersebut. Kelemahan utama politik identitas adalah adanya pengkultusan diri sebagai satu-satunya persekutuan yang dapat menghimpun masyarakat yang merasa senasib dan sepenanggungan. Pengkultusan diri tersebut dapat menutup kemungkinan bagi pihak lain yang berada di luar kelompok mereka untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Hal ini tentu tidak memenuhi aspek keterbukaan sebagaimana yang diharapkan dalam sistem demokrasi yang ideal.

Konsep masyarakat terbuka yang digagas oleh Popper mengandaikan adanya partisipasi politik yang terbuka oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut ditunjukkan dalam kebebasan untuk mengekspresikan sikap politik oleh masing-masing orang. Karena itu, masyarakat mesti membebaskan diri dari segala macam bentuk keterikatan sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai warga negara dengan baik. Salah satu bentuk keterikatan yang paling nyata saat ini adalah keterikatan terhadap latar belakang sejarah. Keterikatan seperti ini bukanlah sebuah hal yang buruk, tapi bila terjadi dalam bentuk yang ekstrim, hal tersebut dapat menimbulkan historisme yang naif. Popper sendiri merupakan seorang yang anti-historisme. Historisme merupakan sebuah paham yang menjunjung tinggi sejarah sebagai sarana untuk memahami fenomena sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Penganut historisme percaya bahwa sejarah secara keseluruhan akan berkembang menurut hukum alam dan juga menurut rencana orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu mengenai bagaimana mencapai tujuan tertentu. Pandangan tersebut dikritik oleh Popper karena dianggap sebagai bentuk doktrin bahwa sejarah merupakan

gambaran awal dari masa depan, atau dengan kata lain masa depan dapat diprediksi melalui sejarah tertentu.

Perlu diingat bahwa, politik identitas yang ada di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari adanya keterikatan kelompok-kelompok tertentu pada sejarah. Mereka menganggap bahwa kelompok mereka (khususnya kelompok Muslim) telah berperan besar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Peran besar dinilai akan terus berlanjut dalam seluruh sistem penyelenggaraan negara saat ini. Memang benar bahwa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada beberapa perkumpulan atau gerakan umat Muslim yang aktif dalam kegiatan anti-kolonialisme. Muhammadiyah, NU dan Masyumi adalah nama-nama besar yang turut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut juga masih aktif dalam menentukan haluan demokrasi di negara ini. Akan tetapi, organisasi-organisasi itu merupakan gerakan keagamaan yang nasionalis. Mereka menghimpun umat Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan pembebasan negara dari kolonialisme dan imperialisme bangsa penjajah.

Hal ini berbeda dengan organisasi-organisasi Islam yang ada saat ini. Kelompok-kelompok seperti HTI dan FPI tidak lagi menjadi wadah yang bergerak dalam haluan nasionalisme. Dengan dalil Islam sebagai agama negara atau Khilafah, mereka berusaha membangkitkan kembali narasi perjuangan Islam dalam kemerdekaan Indonesia untuk mempolitikasi massa demi mempertahankan atau memperjuangkan kekuasaan orang-orang tertentu. Mereka juga yakin bahwa Indonesia juga akan kembali mencapai kejayaan di bawah kekuasaan Islam. ([Mubarak, 2020](#)) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok yang menganut paham historisisme karena sedang mereduksi sejarah untuk mempengaruhi massa demi kepentingan politik mereka. Ini berarti kelompok-kelompok tersebut juga merupakan golongan masyarakat tertutup dan berlawanan dengan konsep masyarakat terbuka yang digagas oleh Karl Popper.

Kritik Popper atas sistem pembagian kelas yang dikemukakan oleh Plato dan Marx juga menjadi acuan untuk mengkritik sistem politik identitas yang sedang berkembang di

Indonesia. Popper berpendapat bahwa pembagian kelas yang dilakukan tersebut akan menciptakan feodalisme dalam masyarakat. Akibatnya, ada determinasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain sehingga yang kuat mendiskriminasi yang lemah dan yang lemah akan ditindas oleh yang kuat. kelompok yang kuat atau dominan akan terus berkuasa, sedangkan yang determinan akan terus berada dalam genggamannya kekuasaan kelompok tersebut. Hal ini pun terjadi pula dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Pemakaian politik identitas seakan-akan melegitimasi bahwa kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia mesti didominasi oleh kelompok mayoritas. Dominasi tersebut ditunjukkan melalui kekuasaan Jawa-sentris, yakni pemimpin negara atau presiden mesti berasal dari pulau Jawa, dan memang demikian, sejauh ini belum ada seorang presiden pun yang berasal dari luar pulau Jawa. Hal ini juga sering dijadikan landasan untuk mengangkat derajat masyarakat di pulau Jawa. Mereka cenderung menganggap diri sebagai masyarakat yang lebih maju dalam peradaban dan lebih unggul dalam intelek dari masyarakat-masyarakat di pulau-pulau lain.

Jika perspektif ini dibangun dalam masyarakat, maka sistem pembagian kelas yang digagas oleh Plato dan Marx masih terjadi pula di Indonesia, yakni dengan menempatkan masyarakat Jawa sebagai kelompok kelas teratas dan masyarakat lain sebagai kelompok kelas menengah dan kelas bawah. Dengan demikian, politik identitas di Indonesia bukan hanya terjadi dalam dominasi Islam saja melainkan juga dalam perspektif masyarakat tentang dominasi kebudayaan tertentu. Ciri lain dari masyarakat terbuka, yakni anti-utopianisme, dapat pula dijadikan landasan untuk mengkritik politik identitas di Indonesia. Orang-orang yang bergelut dalam politik identitas adalah orang-orang yang memiliki utopia tertentu terhadap penyelenggaraan negara ini.

Mereka berpikir bahwa negara ini akan aman, tentram dan sejahtera apabila dikuasai oleh golongan elit dari kelompok mayoritas tertentu. Hal ini karena golongan elit dari kelompok mayoritas dapat lebih mudah menggerakkan massa untuk mendukung proses penyelenggaraan negara yang dicanangkan. Akan tetapi, hal tersebut sering tak berjalan dengan seimbang, golongan elit dari kelompok mayoritas justru sering terlibat dalam penyelewengan-penyelewengan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-

kebijakan publik. Golongan ini malah menjadikan kesempatan selama berkuasa untuk memperluas jaringan kekuasaan dengan melakukan pembagian kekuasaan kepada anggota kelompok-kelompok mereka. Akibatnya, timbulah sindikat kejahatan yang dapat merugikan negara (salah satu contoh kasus yang aktual yakni kasus korupsi proyek BTS yang menjerat banyak orang). Akhirnya, utopia mengenai masyarakat yang sejahtera di tangan golongan elit dari kelompok mayoritas tidak akan sampai pada kenyataan yang membahagiakan semua pihak.

Politik identitas dapat merusak sistem negara karena berusaha memparalelkan segala hal, misalnya menyamakan urusan agama dan negara. Pada dasarnya, negara dan agama biasa berjalan bersama untuk menciptakan kesejahteraan umum, tapi arah gerak keduanya cukup berbeda; negara bergerak pada kisaran kesejahteraan lahiriah, sedangkan agama menjamin kesejahteraan batin melalui ajaran-ajaran imannya. Negara membentuk pola perilaku masyarakat yang mapan melalui nilai-nilai moral ideologi negaranya, sedangkan agama berusaha mewujudkan cita-cita manusia yang bermoral melalui doktrin-doktrin keagamaannya. Mengenai hubungan ini, Franz M. Suseno menjelaskan bahwa ada dua jenis negara, yakni negara sekularistik dan negara agama. ([Magnis-Suseno, 1987](#)) Negara sekularistik merupakan negara yang menolak kehadiran agama-agama di ruang publik, namun menjamin kebebasan beragama bagi semua masyarakatnya.

Di samping itu, negara agama merupakan negara yang diatur dan diselenggarakan oleh hukum agama. Negara seperti ini biasanya terdapat di negara-negara yang memiliki penduduk dari mayoritas agama tertentu. Negara diselenggarakan menurut ideologi yang sama dengan norma agama mayoritas. Keberadaan negara agama ini tentu sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat plural seperti Indonesia. Di sisi lain, politik identitas saat ini seakan-akan sedang berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama dengan menempatkan ajaran Islam sebagai agama sekaligus ideologi negara. Hal tersebut justru merusak kebhinekaan yang telah ditetapkan sebagai aspek penting dari negara ini. Politik identitas yang berkembang saat ini mesti dikenali sebagai sebuah gejala kemunduran demokrasi Indonesia. Kemunduran itu akan terjadi karena aspek kebebasan yang diharapkan dalam pelaksanaan demokrasi hampir tidak terlihat lagi. Masyarakat

malah dituntun pada sebuah doktrin atas kesamaan identitas tertentu yang meyakinkan mereka bahwa keadilan dan kesejahteraan hanya akan tercapai jika orang dari golongan tertentu yang berkuasa.

Popper menyebut hal tersebut sebagai utopisme dalam politik, yakni sebuah klaim atas kepastian kebenaran-kebenaran dalam kenyataan yang akan datang. Klaim ini biasanya disampaikan oleh kelompok fundamentalis dan kelompok ideologis. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai masa depan sehingga dapat membangun sistem yang baik untuk menyongsong masa depan tersebut. Hal tersebut muncul dalam cita-cita politik yang dicetuskan atas dasar kepentingan orang-orang tertentu. Dalam hal ini, politik identitas juga dapat disebut sebagai bentuk utopisme politik karena ada usaha untuk menggunakan kesamaan identitas tertentu untuk memberikan utopia kepada masyarakat luas. Utopia seperti ini tentu akan mengaburkan demokrasi yang telah lama eksis di negara ini karena demokrasi merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan kebaikan secara bersama melalui proses hidup bernegara. Demokrasi akan berjalan baik apabila semua warga negara terlibat dalam perannya untuk mendukung penyelenggaraan negara. Sebaliknya, demokrasi akan mengalami kemandekan jika tidak didukung oleh situasi politik yang kondusif. Oleh karena itu, politik identitas yang naif mesti perlahan-lahan ditekan agar demokrasi ideal dapat diwujudkan.

Politik identitas bukanlah sebuah cara berpolitik yang semata-mata buruk sebab politik ini sejatinya diarahkan untuk memperjuangkan hak kelompok-kelompok minoritas dan yang mengalami diskriminasi. Akan tetapi, jika politik identitas memasuki ranah perpolitikan negara demokrasi, cara berpolitik ini mesti ditekan sebab demokrasi mesti menjamin keterbukaan dan kebebasan yang bertanggung jawab dari semua pihak. Hal ini karena politik identitas sering dipakai oleh para elit politik untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesalahan utama bukan terletak pada politik identitas itu sendiri melainkan penyalahgunaan politik identitas untuk kepentingan politik kelompok atau orang tertentu.

KESIMPULAN

Politik identitas sering mengarah kepada praktik-praktik politik yang tidak wajar sehingga merusak citra politik itu sendiri. Banyak orang yang bergelut dalam politik identitas sering terlibat dalam fundamentalisme agama, praktik intoleran bahkan aksi separatis yang membahayakan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Karena itu, masyarakat mesti lebih terbuka terhadap cara berpolitik yang bebas dan aktif tanpa terikat pada identitas tertentu. Identitas yang dimilikinya sebaiknya hanya sebagai tanda, bukan sebagai alat untuk memonopoli atau dimonopoli oleh pihak lain. Kesadaran akan pentingnya kebebasan politik mesti diedukasi dalam masyarakat agar mereka tidak terjerumus dalam praktik-praktik politik yang keliru.

Praktik politik identitas yang terjadi di Indonesia bisa diidentifikasi sebagai bentuk ketertutupan masyarakat dalam demokrasi. Hal tersebut tidak sejalan dengan konsep masyarakat terbuka yang digagas oleh Karl Popper. Karena itu, tinjau kritis konsep masyarakat terbuka terhadap politik identitas merupakan jawaban yang tepat dalam usaha menilai politik identitas itu sendiri. Hal ini agar cita-cita demokrasi yang ideal dalam masyarakat dapat tercapai dalam penyelenggaraan negara ini. Demokrasi hanya bisa maju apabila masyarakat mulai terbiasa melupakan nostalgia masa lalu dan menekan utopia masa depan yang naif.

Dengan demikian penelitian ini berkontribusi bagi generasi muda dalam menjada relasi harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Adapun rekomendasi dari penelitian ini agar peneliti selanjutnya mendalami konsep masyarakat terbuka dalam membangun dialog lintas agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar, N., Yusriyyah, N., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1 (1), 41–58.

- Firmansyah, M. F., & Kurniawan, A. (2021). Literature study of political communication based on politic identity and symbolic interactionism: The role of middle class in information of democratization. *The Spirit of Society Journal*, 5 (1), 55–73.
- Hafid, W. (2020). Geneologi radikalisme di Indonesia (Melacak akar sejarah gerakan radikal). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1 (1), 31–48.
- Hakim, A. (2010). Negara dalam perspektif Plato. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9 (1), 59–74.
- Hendriwani, S. (2022). Teori kelas sosial dan marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2 (1).
- Heryani, A., et al. (2023). Identification of concepts and applications of best practices in public policy and services. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13 (1), 26–41.
- Hidayah, N., Hidayati, S., & Zada, K. (2024). Islamic feminism in Indonesia: The case of Fiqh an-Nisa program P3M/Rahima. *Religion, Education, Science and Technology*, 267–272.
- Ibrahim, I., Haryadi, D., & Hidayat, N. (2024). Identity, political culture, and democracy naivety in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 187.
- Latuheru, A. C., Lattu, I. Y. M., & Tampake, T. R. (2020). Pancasila sebagai teks dialog lintas agama dalam perspektif Hans-Georg Gadamer dan Hans Küng. *Jurnal Filsafat*, 30 (2), 150–180.
- López, C. (2024). The more democracy, the better? On whether democracy makes societies open. *Social Sciences*, 13 (5), 261.
- Mubarak, H. Z. (2020). Wacana Islam dalam politik praktis di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*, 1 (2), 18–36.
- Mustaqim, A. H. (2022). Mengonstruksi masa depan Indonesia: Situasi retorikal tentang Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Komunika Islamika*, 9 (1), 1–14.
- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi antar umat beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 50–61.

- Pangaribuan, S. A. (2023). Eksistensi hak kebebasan berpendapat terkait mengkritik kebijakan pemerintah yang terancam oleh UU ITE. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1 (4), 27–36.
- Rahma, T., et al. (2022). Intolerance in the flow of information in the era of globalization. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1 (1), 33–118.
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12 (1), 107–136.
- Sugianto, S., et al. (2024). The issue of Islamic higher education development in Indonesia from 1945 to present. *Yupa: Historical Studies Journal*, 8 (1), 192–202.
- Susanto, S., Abra, E. H., & Hadiyanto, A. (2025). Dinamika politik identitas dalam pemilu 2024: Tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8 (3), 1506–1518.
- Widarda, D., & Rachman, B. M. (2023). Dinamika NU: Komitmen kebangsaan, semangat kembali ke khittah, serta pemberdayaan civil society. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3 (3), 475–488.
- Wikandaru, R., & Cathrin, S. (2021). Ideologi sebagai ramalan masa depan: Hakikat ideologi menurut Karl Mannheim. *Jurnal Yaqzhan*, 7 (2).
- Yusuf, B. (2018). Politik dalam Islam: Makna, tujuan, dan falsafah. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4 (1), 114–130.
- Umar, H., & Putri, I. S. (2022). Birokrasi politik dan bisnis di Indonesia. *Ilmu dan Budaya*, 43 (1), 79–102.
- Widjaja, P. S., Wibowo, D. P. A., & Geovasky, I. (2021). Politik identitas dan religiusitas perdamaian berbasis Pancasila di ruang publik. *Gema Teologika*, 6 (1), 95–126.
- Maarif, A. S. (2012). *Politik identitas dan masa depan pluralisme Indonesia*. Jakarta: Edisi Digital.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- (Rusman, 2011)